

ANALISIS JENIS BELANJA PADA PPPPTK SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA

Analysis of Budgeting Type On Work Unit PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta

Oleh : Sigit Restuhadi
Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta
srestuhadi@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini mempunyai tiga tujuan: Pertama, pengalokasian dan realisasi anggaran Jenis Belanja. Kedua, tingkat ekonomi daya serap anggaran Jenis Belanja. Ketiga, perlakuan bila terdapat selisih antara pengalokasian dengan realisasi anggaran Jenis Belanja. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan perbandingan angka anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan angka anggaran realisasinya, yang mana hasil analisis tersebut disajikan berupa angka ekonomis anggaran. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan kajian dokumentasi dalam bentuk tulisan, dan gambar, di mana metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian, pengalokasian dan realisasi anggaran Jenis Belanja periode tahun anggaran 2010-2012 fluktuatif, karena pada tahun 2012 terdapat selisih penurunan pada tahun sebelumnya yaitu alokasi anggaran Jenis Belanja sebesar (Rp8.285.764.000) atau -16,57%, dan realisasi anggaran Jenis Belanja sebesar (Rp5.911.420.047) atau -12,81%. Tingkat ekonomi anggaran Jenis Belanja yang terdiri: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja bantuan sosial dikatakan ekonomis, karena kriteria tingkat ekonomi tahun 2010 diperoleh nilai 91,90%, tahun 2011 diperoleh nilai 92,26%, tahun 2012 diperoleh nilai 96,41%. Perlakuan selisih anggaran Jenis Belanja terdapat pengembalian anggaran Jenis Belanja ke Kas Umum Negara untuk tahun anggaran 2011 dan 2012 pada akun belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Kata kunci: Analisis Jenis Belanja, Jenis Belanja, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran, Alokasi dan Realisasi Anggaran.

Abstract

This research has three main objectives: First, budget type allocation and realization. Second, economic level of budget type absorption. Third, treatment if there is a difference between budget type allocation with budget type realization. This research is a qualitative descriptive research with comparative predetermined budget figures and budget figures realization, in which the results of the analysis are presented in the form of economical budget figures. Data collection methods used in this research by reviewing the documentation in writing, and images, where the data analysis method used is descriptive quantitative. Research results, the allocation and the realization of the budget type in the 2010-2012 fiscal year period occurred fluctuating, because in 2012 there was difference in the decline previous year on the allocation of budget type amount of (Rp8.285.764.000) or -16,57%, and budget type realization amount of (Rp5.911.420.047) or 12,81%. Economic level budget type consist of: employee budget, goods and services budget, capital budget, and social assistance budget can be said to be economically, because economic level criteria in 2010 obtain economic value 91,90%, in 2011 obtain economic value 92,26%, in 2012 obtain economic value 96,41%. Treatment difference in the budget, there is return of budget type to the State Treasury in 2011 and 2012 on account employee budget and goods and services budget.

Keywords: Analysis of budgeting type, budget type, budget allocation, budget realization, budget allocation and realization.

PENDAHULUAN

Dalam upaya pencerminan untuk menjamin stabilitas dan pemerataan maka Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat di dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, dan penghindaran dari salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politikal maupun administratif” (Pheni Chalid. 2005).

Kepemerintahan yang baik ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. “Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan, transparansi yang dikaitkan dengan akuntabilitas mempunyai makna bahwa pertanggungjawaban tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum sebagai penilai pemerintah” (Abdul Halim. 2002: 166). Partisipasi maksudnya adalah mengikutsertakan “keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya” (Mardiasmo. 2002: 18). "Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban

yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga atas segala tindakannya yang memberi wewenang”. (Abdul Halim. 2002: 157), dengan kata lain akuntabilitas adalah pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yaitu penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (*reliable*) maka perlunya disusun penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disebut dengan SAP, hal tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah, selanjutnya disingkat dengan PP, yaitu PP nomor 71 tahun 2010 dan PP nomor 39 tahun 2007 tentang “Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah”, untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, pada tanggal 9 Mei 2008 pemerintah telah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yaitu Peraturan Menteri Keuangan yang selanjutnya disingkat dengan PMK nomor 73/PMK.05/2008 tentang “Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan, Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja” dan PMK nomor 238/PMK.05/2011 tentang

“Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan”. Hal ini mensyaratkan bentuk isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara selanjutnya disingkat dengan APBN disusun dan disajikan sesuai dengan SAP.

Mengalokasikan dan merealisasikan belanja dalam rangka mencapai tujuan bernegara yaitu: stabilitas fiskal makro, alokasi sumber daya sesuai prioritas, dan pemanfaatan dan alokasi secara ekonomi, efisien, efektif. Pada tataran tingkat ekonomi anggaran Jenis Belanja merupakan salah satu upaya pelaksanaan program dan kegiatan agar terjadi keseimbangan untuk pertanggung jawaban manajemen keuangan Kementerian Negara/Lembaga terhadap publik yang mana wajib melakukan optimalisasi anggaran belanja sehingga dapat meningkatkan kinerja, anggaran, sumber daya, dan kesejahteraan masyarakat. Pada tataran perlakuan bila terjadi selisih antara alokasi dengan realisasi anggaran Jenis Belanja adalah merupakan suatu pengendalian anggaran, belanja, dan kas negara dengan tujuan semata-mata untuk kepentingan kelancaran arus anggaran, belanja dan kas. Hal itu tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran, selanjutnya disebut dengan LRA pada Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik

dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Seni dan Budaya Yogyakarta selanjutnya disebut dengan PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta harus mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, demokrasi, dan profesionalitas yang memiliki komitmen tinggi bersih dan bertanggung jawab.

Mengadministrasikan pengelolaan dan pemanfaatan uang negara disusun berdasarkan laporan keuangan pada seluruh entitas pelaporan (Kementerian Negara/Lembaga/KPPN/entitas lainnya), yang sesuai dengan 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa: “Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat”, yang selanjutnya disingkat dengan LKPP adalah alat pertanggung jawaban keuangan yang disampaikan kepada DPR yang diatur menurut undang-undang. Fungsi anggaran pada pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, hal ini dikarenakan oleh:

1. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
2. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara

belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.

3. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
4. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.
5. Hasil pelaksanaan anggaran harus dilaporkan pada keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian di PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta, karena terdapat masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengalokasian dan realisasi anggaran Jenis Belanja sekaligus ingin mengetahui tingkat ekonomi anggaran Jenis Belanja, serta perlakuan bila terjadi selisih antara alokasi dengan realisasi anggaran Jenis Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disebut LRA pada satuan kerja selanjutnya disebut Satker PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta. Dari paparan tersebut, ketertarikan penulis terhadap penelitian ini dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: “Analisis Jenis Belanja Pada Satuan Kerja (Satker) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan (PPPPTK) Seni dan Budaya Yogyakarta.”

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian dimungkinkan bervariasi karena sesuai dengan bentuk alami penelitian kualitatif yang mempunyai sifat timbul secara mendadak atau tiba-tiba, di mana fenomena muncul sesuai dengan prinsip alami yaitu fenomena apa adanya sesuai dengan yang dijumpai oleh seorang peneliti dalam proses penelitian di lapangan. Penelitian kualitatif dapat dipandang juga sebagai penelitian partisipatif yang desain penelitiannya memiliki sifat fleksibel atau dimungkinkan diubah guna menyesuaikan rencana yang telah dibuat.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengupas fenomena yang diamati di lapangan di mana metode penelitian ini menggambarkan temuan variabel di lapangan. (Sulipan, 2007: 33). Jadi peneliti hanya cukup menjabarkan temuan di lapangan dan tidak memerlukan variabel atau

menerangkan saling hubungan atau komparasi, dan juga tidak memerlukan skala hipotesis.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta. Jl. Kaliurang Km 12,5. Klidon, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, D.I. Yogyakarta 55581 dengan waktu penelitian pada bulan Maret sampai medio Mei 2013 untuk mengumpulkan data, kemudian pada medio Mei sampai Juli 2013 dilakukan analisis data dan penyusunan laporan penelitian.

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini hanya melibatkan variabel tunggal, dalam hal ini yaitu: “Jenis Belanja” yang mana tidak mengungkapkan hubungan antar variabel sehingga lebih menekankan pada proses penelitian.

Jenis Data

Data Sekunder

Peneliti hanya memanfaatkan data yang ada dalam melakukan penelitiannya. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari objek penelitian PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta yaitu berupa LRA dan CaLK penelitian ini pada periode 2010-2012.

Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang berkaitan dengan masalah Jenis Belanja. Kegiatan tanya jawab ini berisikan pertanyaan-pertanyaan (lihat lampiran 13-18) untuk memberikan informasi terkait penelitian ini di tempat objek penelitian berlangsung.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, di mana dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan cara mendatangi langsung tempat yang digunakan untuk penelitian, kemudian penulis melakukan pengambilan data baik itu dengan cara pencatatan maupun dengan cara fotokopi sesuai dengan data yang diperlukan.

Metode Analisis Data

Indikator ekonomis merupakan indikator tentang penggunaan input. Pemanfaatan sumber daya di bawah anggaran menunjukkan adanya penghematan, sedangkan melebihi anggaran menunjukkan adanya pemborosan (Mahmudi 2010: 104).

Teknik analisis data ini untuk mengukur nilai ekonomis secara matematis yang merupakan perbandingan antara realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran untuk memperoleh tingkat ekonomi yang kemudian dikalikan 100%. Rasio tingkat ekonomi menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran peneluaran}} \times 100\%$$

(Mahsun, 2013: 186)

Dari uraian di atas, ditentukan kriteria tingkat ekonomi sebagai berikut (Mahsun, 2013: 186):

- a. Ekonomis, jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$).
- b. Ekonomi Berimbang, jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$).
- c. Tidak Ekonomis, jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Profil PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta

a. Nama Lembaga

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Seni dan Budaya dulu Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG) Kesenian adalah unit pelaksana teknis pusat di lingkungan Direktorat

Pendidikan Dasar dan Menengah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai Pusat Pengembang Mutu Pendidikan Nasional dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, meningkatkan, mengembangkan pendidikan dan pelatihan (Diklat) tenaga kependidikan tingkat nasional di bidang seni dan kriya dalam rangka peningkatan mutu, ekonomi, dan relevansi pendidikan nasional.

b. Berdirinya Lembaga

PPPPTK (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan) Seni dan Budaya pertama kali didirikan bernama PPPG (Pusat Pengembangan Penataran Guru) Kesenian yang berkedudukan di Yogyakarta. Mengawali kegiatannya sebagai Proyek Peningkatan Pusat Pengembangan Penataran Guru Kesenian pada 1 September 1983. Kegiatan dimulai di Dalem Ngadiwinatan, Alun-Alun Selatan Keraton Yogyakarta. Sementara pembangunan kampus dilaksanakan pada tahun anggaran 1985/1986 dan secara keseluruhan selesai pada tahun 1988/1989. Kegiatan kantor pindah ke lokasi baru di Klidon, Sukoharjo, Ngaglik, Slerman pada 1 Januari 1988. Status Unit Pelaksana Teknis dimulai dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0529/0/1990 Tanggal 14 Agustus 1990. Berdasarkan SK Mendikbud itu, tugas dan fungsi utama PPPPTK Seni dan Budaya membina, mengembangkan, dan meningkatkan SMK-SK (Sekolah Menengah Kejuruan – Seni Kerajinan), khususnya dalam hal materi dan teknis kependidikan di bidang seni dan kriya. Binaannya saat ini berjumlah 53 SMK-SK negeri dan swasta tersebar di seluruh penjuru tanah air.

Pada Tanggal 13 Februari 2007, lahir Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 8 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK, maka PPPG Kesenian berubah nama, peran tugas dan fungsi lebih besar dari sebelumnya. Sehubungan dengan pelaksanaan otonomi pendidikan, UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa "Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal". Berarti dengan paradigma layanan pendidikan ke daerah harus berpijak pada peta pengembangan sumber daya manusia, sumber daya alam dan pendidikan, mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kekayaan sumber daya yang besar.

c. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Program

1) Kedudukan

PPPPTK adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK). PPPPTK mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidikan dan tenaga kependidikan Seni dan Budaya.

2) Tugas Pokok

- a) Merencanakan program pengembangan diklat.
- b) Melaksanakan diklat teknis pendidikan untuk meningkatkan mutu dan kompetensi guru.
- c) Melaksanakan pengembangan diklat guru.
- d) Melaksanakan peningkatan cara penyajian dan materi diklat.
- e) Melaksanakan penjaminan mutu dan evaluasi diklat.
- f) Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga lembaga.

3) Fungsi

- a) Penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan bidang Seni dan Budaya.
- b) Pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan

tenaga kependidikan bidang Seni dan Budaya.

- c) Fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Seni dan Budaya.
- d) Evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, dan Pelaksanaan urusan administrasi PPPPTK.

4) Program

- a) Pengembangan modul/bahan ajar.
- b) Pengembangan model-model pembelajaran (lesson study, Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Mandiri disingkat PAKEM, Pembelajaran Matematika Realistik (PMR)
- c) Forum ilmiah dan kompetensi
- d) Inovasi dan pengkajian
- e) Pengembangan Prototype
- f) Pelaksanaan TNA (*Training Needs Assessment*)

d. Visi dan Misi

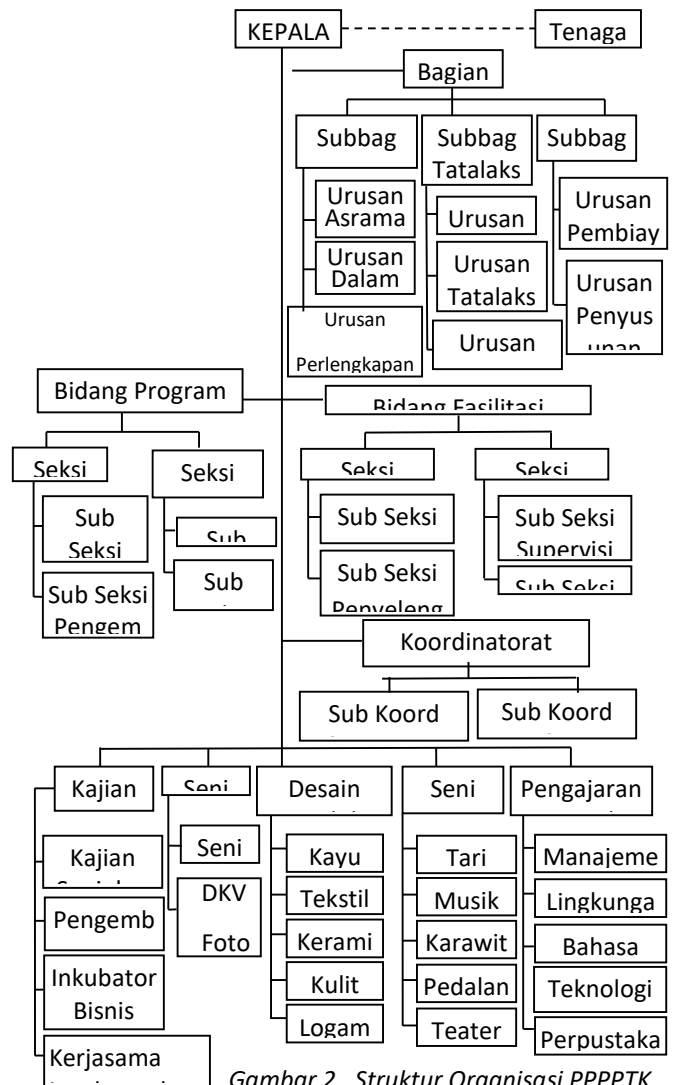
1) Visi Lembaga

Visi PPPPTK Seni dan Budaya (PPPG Kesenian) adalah pusat pengembang mutu pendidikan nasional seni, kriya, dan pengembang desain kriya yang andal.

2) Misi Lembaga

Misi PPPPTK Seni dan Budaya adalah melaksanakan tugas diklat dan pengembangan tenaga pendidikan untuk meningkatkan mutu dan kompetensi kerja guru SMK-SK, pengembangan diklat kertakes (kerajinan tangan dan kesenian), dan dikseni (pendidikan seni).

e. Struktur Organisasi



Gambar 2. Struktur Organisasi PPPPTK

Pembahasan

Analisis Belanja PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta Tahun Anggaran 2010

Tahun 2010, PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta dalam menyusun informasi laporan keuangan yang disajikan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

LRA menjelaskan perbandingan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 1, berikut ini:

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2010

Kementerian Negara/Lembaga	: 023	Departemen Pendidikan Nasional	
Eselon I	: 08	Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
Wilayah/Propinsi	: 0400	Prop.D.I. Yogyakarta	
Satuan Kerja	: 532938	PPPPTK Seni dan Budaya	
Jenis Kewenangan	: KD	Kantor Daerah	
(dalam rupiah)			
No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
A.	PENDAPATAN NEGARADAN HIBAH		
	1. Penerimaan Dalam Negeri		504.566.206
	a. Penerimaan Perpajakan	0	188.106.206
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	316.460.000
	2. Hibah	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN HIBAH		0
B.	BELANJA		
	1. Belanja Pegawai	13.185.004.000	13.360.679.216
	2. Belanja Barang	31.202.644.000	27.277.184.986
	3. Belanja Modal	2.792.716.000	2.719.109.700
	4. Pembayaran Bunga Utang	0	0
	5. Subsidi	0	0
	6. Hibah	0	0
	7. Bantuan Sosial	0	0
	8. Belanja Lain-lain	0	0
	JUMLAH BELANJA	47.180.364.000	43.356.973.902
C.	PEMBIAYAAN		
	1. Pembiayaan Dalam Negeri (neto)	0	0
	a. Perbankan Dalam Negeri	0	0
	b. Non Perbankan Dalam negeri (neto)	0	0
	2. Pembiayaan Luar Negeri (neto)	0	0
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C1+C2)	0	0

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2010 PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta.

Dari tabel 1, diketahui tahun 2010 realisasi pendapatan negara dan hibah periode Januari–Desember 2010 pendapatan negara dan hibah Rp.504.566.206; belanja Rp.43.356.973.902 dari dana yang dianggarkan dalam DIPA tahun anggaran 2010 Rp.47.180.364.000 dengan ketercapaian penggunaan anggaran 91,90%.

Realisasi pendapatan negara dan hibah tahun anggaran 2010 terdiri dari penerimaan pajak Rp.188.106.206 meliputi penerimaan pajak dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, 22, dan 23. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperoleh penerimaan Rp.316.460.000 dan penerimaan hibah

Rp.0,00 (nihil), sehingga jumlah pendapatan negara dan hibah pada tahun 2010 sejumlah Rp.504.566.206.

Realisasi belanja tahun 2010 ketercapaian penggunaan anggaran belanja pegawai 101,33%, anggaran belanja barang 87,42%, belanja modal 97,36%. Pada akun pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, dan belanja lain-lain anggaran tidak dialokasikan. Pada akun bantuan sosial anggaran belanja tersebut tidak dialokasikan. Pada tahun sebelum dan sesudahnya yaitu tahun 2009 dan 2011 untuk belanja bantuan sosial anggaran dialokasikan dalam DIPA.

Analisis Belanja PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta Tahun Anggaran 2011

Sajian informasi laporan keuangan disajikan berupa LRA yang menjelaskan perbandingan dengan DIPA, tahun anggaran 2011 dapat dilihat pada tabel 2, berikut ini:

Tabel 2. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011

Kementerian Negara/Lembaga	: 023	Departemen Pendidikan Nasional
Eselon I	: 08	Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Wilayah/Propinsi	: 0400	Prop. D.I. Yogyakarta
Satuan Kerja	: 533938	PPPPTK Seni dan Budaya
Jenis Kawenangan	: KD	Kantor Dasar

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
A.	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		
1.	Pendapatan Negara dan Hibah Transaksi Kas	0	116.597.880
a.	Penerimaan Dalam Negeri	0	116.597.880
1)	Penerimaan Perpajakan	0	0
2)	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	116.597.880
b.	Hibah	0	0
2.	Pendapatan Negara dan Hibah Transaksi Non Kas	0	0
a.	Penerimaan Dalam Negeri Non Kas	0	0
1)	Penerimaan Perpajakan non Kas	0	0
2)	Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas	0	0
b.	Hibah Non Kas	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	116.597.880
B.	BELANJA		
1.	Belanja Transaksi Kas	50.003.448.000	46.131.838.088
a.	Belanja Pegawai	14.769.424.000	15.018.979.218
b.	Belanja Barang	29.551.322.000	25.456.629.870
c.	Belanja Modal	4.302.702.000	4.291.229.000
d.	Pembayaran Bunga Utang	0	0
e.	Subsidi	0	0
f.	Hibah	0	0
g.	Bantuan Sosial	1.365.000.000	1.365.000.000
h.	Belanja Lain-lain	0	0
2.	Belanja Transaksi Non Kas	0	0
a.	Belanja Pegawai	0	0
b.	Belanja Barang	0	0
c.	Belanja Modal	0	0
d.	Pembayaran Bunga Utang	0	0
e.	Subsidi	0	0
f.	Hibah	0	0
g.	Bantuan Sosial	0	0
h.	Belanja Lain-lain	0	0
	JUMLAH BELANJA	50.003.448.000	46.131.838.088
C.	PEMBILAYAAN		
1.	Pembiayaan Dalam Negeri (neto)	0	0
a.	Perbankan Dalam Negeri	0	0
b.	Non Perbankan Dalam negeri (neto)	0	0
2.	Pembiayaan Luar Negeri (neto)	0	0
a.	Pemarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0
b.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C1 + C2)	0	0

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2011 PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta.

Dari tabel 2, tahun anggaran 2011 realisasi pendapatan negara dan hibah periode Januari–Desember 2011 adanya tambahan anggaran belanja yaitu belanja bantuan sosial tahun yang lalu anggaran tidak dialokasikan dan penerimaan perpajakan Rp.0,00 (nihil), sedangkan besaran jumlah pendapatan negara dan hibah adalah Rp.116.597.880,00; belanja Rp.46.131.838.088 dari dana yang dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DIPA, yang pada tahun anggaran 2011 Rp.50.003.448.000,00 dengan ketercapaian penggunaan anggaran sebesar 92,26%.

Realisasi pendapatan negara dan hibah pada tahun anggaran 2011 meliputi PNBPN diperoleh penerimaan Rp.116.597.880 penerimaan hibah dan penerimaan perpajakan Rp.0,00 (nihil). Jumlah pendapatan negara dan hibah tahun 2011, Rp. 116.597.880.

Realisasi belanja tahun 2011 ketercapaian penggunaan anggaran anggaran belanja pegawai 101,69%, anggaran belanja barang 86,14%, belanja modal 99,73%, dan belanja bantuan sosial 98,91%. Komposisi Belanja pada tahun anggaran 2011 yaitu Rp.46.131.838.088,- ditampilkan pada tabel 3, berikut ini:

Tabel 3. Komposisi Belanja Terhadap Total Relaisasi Tahun Anggaran 2011

(dalam rupiah)				
Kode	Uraian	Realisasi Belanja (Bruto)	Pengembalian Belanja	Realisasi Belanja (Neto)
51.	Belanja Pegawai	15.022.870.348	3.891.130	15.018.979.218
52.	Belanja Barang	25.460.469.870	3.840.000	25.456.629.870
53.	Belanja Modal	4.291.229.000	-	4.291.229.000
57.	Belanja Bantuan Sosial	1.365.000.000	-	1.365.000.000
Total		46.139.569.218	7.731.130	46.131.838.088

Sumber: Olah data CaLK Tahun Anggaran 2011 PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta.

Pada tabel 3, tahun anggaran 2011 Jenis Belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Realisasi pelaksanaan belanja untuk periode Januari–Desember 2011, Rp.15.022.870.348 dan terdapat sejumlah pengembalian belanja pegawai Rp.3.891.130 sehingga realisasi belanja pegawai

Rp.15.018.979.218 atau pengembalian belanja pegawai 0,03%.

2) Belanja Barang

Realisasi pelaksanaan belanja untuk periode Januari–Desember 2011, Rp.25.460.469.870 (bruto), terdapat pengembalian belanja barang Rp.3.840.000,00, sehingga realisasi belanja barang Rp.25.456.629.870,00 (neto), mencapai pengembalian anggaran belanja barang sebesar 0,02%.

3) Belanja Modal

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2011 Rp.4.291.229.000 terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal fisik lainnya, yang mana tidak terjadi pengembalian anggaran belanja modal.

4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial tahun 2011 anggaran dialokasikan dalam DIPA Rp.1.365.000.000 yang mana realisasi belanja bantuan sosial Rp. 1.365.000.000 dan tidak terjadi pengembalian anggaran belanja bantuan sosial.

Analisis Belanja PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta Tahun Anggaran 2012

Tahun 2012, dengan menggunakan PP nomor 71 tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 4, berikut ini:

Tabel 4. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012

Kementerian/Negara/Lembaga	: 023	Departemen Pendidikan Nasional
Eselon I	: 08	Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Wilayah/Propinsi	: 0400	Prop. D.I. Yogyakarta
Satuan Kerja	: 532938	PPPPTK Seni dan Budaya
Jenis Kewenangan	: KD	Kantor Daerah

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
A.	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		
1.	Pendapatan Negara dan Hibah Transaksi Kas	0	268.908.043
a.	Penerimaan Dalam Negeri	0	268.908.043
1)	Penerimaan Pajak	0	0
2)	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	268.908.043
b.	Hibah	0	0
2.	Pendapatan Negara dan Hibah Transaksi Non Kas	0	0
a.	Penerimaan Dalam Negeri Non Kas	0	0
1)	Penerimaan Pajak non Kas	0	0
2)	Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas	0	0
b.	Hibah Non Kas	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	268.908.043
B.	BELANJA		
1.	Belanja Transaksi Kas	41.717.684.000	40.220.418.041
a.	Belanja Pegawai	16.926.255.000	16.791.213.017
b.	Belanja Barang	21.596.498.000	20.293.732.824
c.	Belanja Modal	2.274.931.000	2.265.472.200
d.	Pembayaran Bunga Utang	0	0
e.	Subsidi	0	0
f.	Hibah	0	0
g.	Bantuan Sosial	920.000.000	870.000.000
h.	Belanja Lain-lain	0	0
2.	Belanja Transaksi Non Kas	0	0
a.	Belanja Pegawai	0	0
b.	Belanja Barang	0	0
c.	Belanja Modal	0	0
d.	Pembayaran Bunga Utang	0	0
e.	Subsidi	0	0
f.	Hibah	0	0
g.	Bantuan Sosial	0	0
h.	Belanja Lain-lain	0	0
	JUMLAH BELANJA	41.717.684.000	40.220.418.041
C.	PEMBAYARAN		
1.	Pembayaran Dalam Negeri (neto)	0	0
a.	Perbankan Dalam Negeri	0	0
b.	Non Perbankan Dalam negeri (neto)	0	0
2.	Pembayaran Luar Negeri (neto)	0	0
a.	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0
b.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0
	JUMLAH PEMBAYARAN (C1 - C2)	0	0

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2012 PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta.

Dari tabel 4, tahun 2012 sajian informasi laporan keuangan melalui LRA berupa realisasi pendapatan negara dan hibah, dan belanja. Sajian informasi ini memberikan penjelasan realisasi pendapatan negara dan hibah, dan belanja pada periode Januari–Desember 2012, anggaran belanja bantuan sosial dialokasikan. Realisasi belanja tahun anggaran 2012 adalah Rp.40.220.418.041 atau dengan ketercapaian

penggunaan anggaran 96,41% dari dana yang dianggarkan dalam DIPA Rp.41.717.684.000,- .

Besaran jumlah untuk Pendapatan Negara dan Hibah adalah Rp. 268.908.043 diperoleh dari PNBP dengan ketercapaian penggunaan anggaran 0%, karena memang tidak dianggarkan dalam DIPA. Adapun untuk penerimaan hibah Rp.0,00 (nihil) yang juga tidak dianggarkan dalam DIPA. Belanja pinjaman luar negeri (PLN) Rp.0,00 (nihil) atau mencapai 0,00% dari anggaran. Terdapat penurunan pada belanja negara pada tahun 2012 dengan tahun 2011 Rp.5.911.419.959,- atau 12,81% dikarenakan adanya pengurangan pegawai, revisi DIPA, dan kegiatan yang masih belum dilaksanakan. Untuk itu dapat dilihat pada tabel 5 komposisi realisasi belanja terhadap total realisasi belanja tahun anggaran 2012, berikut ini:

Tabel 5. Komposisi Belanja Terhadap Total Realisasi Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Realisasi Belanja (Bruto)	Pengembalian Belanja	Realisasi Belanja (Netto)
51	Belanja Pegawai	16.791.932.363	719.346	16.791.213.017
52	Belanja Barang	20.302.062.824	8.330.000	20.293.732.824
53	Belanja Modal	2.265.472.200	0	2.265.472.200
57	Belanja Bantuan Sosial	870.000.000	0	870.000.000
	TOTAL	40.229.467.387	9.049.346	40.220.418.041

Sumber: Olah data CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) Tahun Anggaran 2012 PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta

Realisasi belanja tahun anggaran 2012 Rp.40.229.467.387,- dan terdapat pengembalian belanja Rp.9.049.346; yang terdiri dari belanja pegawai Rp.719.346 dan

belanja barang Rp.8.330.000 sehingga realisasi belanja tahun anggaran 2012 Rp. 40.220.418.041. (Neto).

1) Belanja Pegawai

Dari tabel 5, realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2012 adalah Rp.16.791.213.017 atau ketercapaian penggunaan anggaran 99,20% dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA Rp.16.926.255.000. Besarnya realisasi belanja pegawai 41,75% dari total jumlah anggaran belanja tahun anggaran 2012. Perbandingan realisasi belanja pegawai tahun 2012 terdapat selisih kenaikan terhadap tahun anggaran 2011, Rp.1.772.233.799 atau 11,79%. Disebabkan penambahan pegawai, kenaikan gaji pokok, kenaikan gaji berkala, tunjangan fungsional, dan tunjangan beras.

2) Belanja Barang dan Jasa

Dari tabel 5, realisasi belanja barang dan jasa tahun 2012, Rp.20.293.732.824 atau mencapai penggunaan anggaran 93,97% dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA Rp.21.596.498.000, terdapat selisih penurunan dari realisasi anggaran realisasi belanja barang terhadap tahun anggaran 2011 sebesar (Rp.5.162.897.046) atau -25,44%. Disebabkan oleh adanya kegiatan belum terlaksana serta terdapat kenaikan harga pada tahun 2012.

3) Belanja Modal

Dari tabel 5, belanja modal tahun anggaran 2012. Rp.2.265.472.200 atau ketercapaian penggunaan anggaran 99,58% dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA Rp.2.274.931.000. Realisasi belanja modal tahun 2011 Rp.4.291.229.000 terdapat selisih penurunan dari realisasi anggaran realisasi belanja barang terhadap tahun anggaran 2011 adalah yaitu (Rp.2.025.756.800) atau - 89,42%.

4) Belanja Bantuan Sosial

Dari tabel 5, realisasi belanja bantuan sosial tahun anggaran 2012 adalah Rp.870.000.000 atau ketercapaian penggunaan anggaran 94,57% dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA Rp.920.000.000. Realisasi belanja bantuan sosial pada tahun 2011 Rp.1.365.000.000 terdapat selisih penurunan dari realisasi anggaran realisasi belanja barang terhadap tahun anggaran 2011 adalah (Rp.445.000.000) atau -48,37%.

Rekapitulasi Analisis Belanja PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta Tahun Anggaran 2010-2012.

Tahun anggaran 2010-2012, untuk bagian akun pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, dan belanja lain-lain anggaran tidak dialokasikan oleh karena memang tidak

dialokasikan sesuai dengan PP nomor 24 tahun 2005 maupun PP nomor 71 tahun 2010. Dan pada akun realisasi pembiayaan tidak dialokasikan oleh karena memang anggaran pembiayaan tidak dialokasikan dalam DIPA.

Pendapatan Negara dan Hibah PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta meningkat yaitu 53,12% periode 2005-2006 dan 23,33% periode 2006-2007. Peningkatan ini dikarenakan oleh:

- 1) Prediksi tingkat inflasi, kenaikan harga bahan pokok yang melambung akibat pasokan yang terbatas, sementara permintaan naik, dan masuknya beberapa kebutuhan pokok melalui jalur impor.
- 2) Plafon anggaran belanja pada tahun sebelumnya yang mencakup: capaian sasaran program, dasar pertimbangan penentuan besaran pagu untuk mencapai sasaran program, dan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian lembaga dalam menjabarkan program lebih lanjut ke dalam masing-masing kegiatan.
- 3) Prioritas program/kegiatan di tahun tersebut yaitu dengan tujuan dan capaian sasaran program/kegiatan, dasar pertimbangan penentuan besarnya volume program/kegiatan, dan program/kegiatan tugas, pokok dan

fungsi lembaga yang mendapat perhatian lebih.

Keterbatasan Penelitian

Peneliti memiliki keterbatasan yaitu:

- a. Waktu penelitian yang terbatas sehingga hasil yang dicapai belum maksimal meskipun dalam penelitian ini kebutuhan penelitian sudah terpenuhi untuk dapat dipahami dan dimengerti.
- b. Dalam melakukan pencarian data dan informasi baik data dalam bentuk hasil cetakan dokumen/arsip maupun data dalam bentuk dokumen/arsip elektronik terkadang mengalami kesulitan. Selain ketidaksiapan dan ketidaksigapan sumber dalam melakukan pencarian data dan informasi juga dikarenakan sumber melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan klasifikasi Jenis Belanja tersebut maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengalokasian anggaran Jenis Belanja tahun 2010, Rp.47.180.364.000,- realisasi Rp.43.356.973.902, -91,90%. Tahun 2011, Rp.50.003.448.000, dengan

realisasi sebesar Rp.46.131.838.088,- (92,26%). Tahun 2012

Rp.41.717.684.000, dengan perolehan realisasi, Rp.40.220.418.041, -96,41%.

- b. Tingkat ekonomi daya serap anggaran Jenis Belanja periode 2010-2012 dengan melihat hasil persentase poin 1 di atas, maka pada tahun 2010 dapat dikatakan ekonomis. Pada tahun 2011 dapat dikatakan ekonomis dan pada tahun 2012 juga ekonomis.
- c. Perlakuan bila terjadi selisih antara pengalokasian dengan realisasi anggaran Jenis Belanja pada tahun 2010, belanja pegawai tidak terjadi pengembalian anggaran belanja kepada KUN, sedangkan belanja barang dan jasa, dan belanja modal terjadi pengembalian anggaran belanja kepada KUN, dan belanja bantuan sosial tidak dianggarkan. Pada tahun 2011 dan 2012 terjadi pengembalian anggaran Jenis Belanja kepada KUN. Pengembalian rupiah murni ini dikembalikan pada Bank yang telah ditunjuk melalui SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal terkait dengan keterbatasan penelitian,

maka beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Bagi investor dan calon investor perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia agar lebih seksama dan juga memperhatikan aspek Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan perusahaan sebagai pertimbangan dalam melakukan investasi.
- b. Bagi para peneliti selanjutnya dapat memperpanjang periode penelitian sehingga dapat melihat kecenderungan yang terjadi dalam jangka panjang sehingga akan menggambarkan kondisi yang sesungguhnya terjadi agar memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat. Edisi Pertama.
- Ade Isyana Hairunnisa Lubis. (2006). "Pengalokasian DAU dan PAD Dalam Belanja Pemkab Labuhan Batu". *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Deddi Nordiawan (2009). *Klasifikasi Belanja dan Perhitungan Biaya Aktivitas*. (Website: <http://id.scribd.com/doc/46490498/Klasi>)

fikasi-Belanja-dan-Perhitungan-Biaya-Aktivi tas. Dilihat pada pukul 15.45 WIB. Minggu, 7 April 2013).

Depdiknas. (2010). *Penguatan Tata Kelola, Sistem Pengendalian Manajemen, dan Sistem Pengawasan Intern 2010-2014*. Jakarta: Depdiknas.

Dini Rosdini, SE., M.Ak, Ak. (2008). *Akuntansi Pendapatan dan Belanja Bagi Daerah*. (Website: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:MPSsHVWXvIkJ:pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/06/akuntabilitaspendapatan.pdf+uu+pengertian+belanja+langsung&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEESj_4_MdLw-HjY1PtkaugoEDt9I-aSpq0WEpTSQy81txKCVELOAy41CMqUoARR6i0qNymtj6Fb3CdUs-ZM_9KFFvS43BRct4oc3T067sebljJlSENU1v_SJvd0e3ApOb7UJsq-rk&sig=AH_IetbS_oSbljLrbJZJvvdEJR7CR4G86gzg). Diunduh pada pukul: 05.15 WIB. Rabu, 6 Maret 2013).

Haryanto, SE. (2007). *Modul Akuntansi Pemerintah Daerah*. (Website: <https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:T09yhU4jhVgJ:images.vava200690.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/TQsSRAooCswAAD9do4Q1/24855055-Modul-Akuntansi-Pemerintah-Daerah-Bab-3.pdf?key%3Dvava200690:journal:11%26nmid%3D396867354%22uu+penjelasan+pengertian+belanja+langsung%22&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEEShWkC8tBDtyQHICQecU48yos0shZLchYHvUUg1Cymivval0vYd4HqjcF0VwWfm3vB07vkfcLm9KGEC0uuD0HGGQwuEZE38v9bCf->

s2dAFCAr4lEZH4Dsu6ckJaKFMFtUZvH&sig=AHIEtbTvGkhd8FIdrddce5bm4siwWnARA. Diunduh pada pukul: 20.33 WIB. Selasa, 5 Maret 2013).

Indra Bastian. (2006). *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: BPFE.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2012). *Centre for Development of Accountancy and Finance*. (Website <http://www.anggaran.depkeu.go.id/webcontent-list.asp?ContentId=633>) Diakses pukul: 09.53 WIB. Rabu, 20 Maret 2013).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2012). *Jenis Belanja, Artikel 001*. (Website: <http://www.perbendaharaan.go.id/new/?pilih=dl&mod=yes&aksi=car i&search=jenis+belanja&kid=99>). Dilihat pada pukul: 10.32 WIB. Rabu, 3 April 2013).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), *Buletin Teknis (Bultek) No .04. (2007) Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah*. (Website: http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=klasifikasi%20belanja%20menurut%20peraturan%20perundangan&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved0CC8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ksap.org%2FSlide_Bultek_17042007.pdf&ei=AaFVUbDnGI_rrQfPjoDQCg&usg=AFQjCNEHZjdFAVdE09fYMv4R1bneJsBIw&bvm=bv.44442042,d.bmk). Diunduh pada pukul: 21.34 WIB. Rabu, 20 Maret 2013).

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2009). *Pengertian Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung*. Artikel 002. (Website:https://docs.google.com/viewer?a=v&cache=NYuVGdxvVbEJ:www.ksap.org/SlideBultek17042007.pdf+%22uu+pengertian+belanja+lansung%22&hl=id&pid=bl&srcid=ADGEESh-oVeUAIkxaj3TD_L8Bye19svlNP45DXVwnaIlgADUdrFM_CN3SCDzF3GKljNqT6C6rTL7m9nUa_aHFg5iNTK5gGV-Vp9pqlyy-PrPkKiFQqlz4W_uyteocoPYtp1IdCOG18-FmX&sig=AHIE_tbQDo_RC_uXhtOXlykDAR7fMLOucneQ). Diunduh pada pukul: 07.06 WIB. Rabu, 6 Maret 2013).
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi. Cetakan Pertama.
- _____. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Mohamad Mahsun. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Cetakan Keempat. Yogyakarta: BPFE
- Monika Siagian. (2008). "Pengaruh DAU, PAD dan Pendapatan Lain-lain Yang Diangap Sah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Utara". *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Pheni Chalid. (2005). *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi*. Jakarta: Kemitraan.
- PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta. (2010). *Laporan Keuangan PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta*. Yogyakarta: PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta.
- PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta. (2011). *Laporan Keuangan PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta*. Yogyakarta: PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta.
- PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta. (2012). *Laporan Keuangan PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta*. Yogyakarta: PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta.
- Republik Indonesia. *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008 Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.02/2011. Lampiran III. Tentang Klasifikasi Anggaran*. (Website: <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/101~PMK.02~2011PerLamp%20II.htm>). Diakses pada pukul 16.20 WIB. Jumat, 29 Maret 2013).
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.05/2008 Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian*

Negara/Lembaga /Kantor/Satuan Kerja.
Jakarta: Kementerian Keuangan.

Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta:
Kementerian Dalam Negeri.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 Tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 2005 Dana Bergulir*. (Website: <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=undang-undang-24-2005&source=web&c>
www.danabergulir.com d=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=htt p%3A%2F%2Fwww.danabergulir.com%2 Fperaturan-perundangan%2FPeraturan-Pe merintah%2FP242005.pdf&ei=1pQ2U YGQK8bprAfSsIDgCw&usg=AFQjCN F7UK 2vWzJRSy- 2p9KShC4eSzekg&bvm=bv.4 3287494,d.bmk. Diunduh pada pukul: 11.45 WIB. Minggu, 3 Maret 2013).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Riswan Yudhi Fahrianta dan Viani Carolina (2012). *Ekonomi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas* (Website: [Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.](https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7JIRU2hluQUJ:bappeda.jabarprov.go.id/docs/perencanaan/20061206185652.pdf+Belanja-langsung-adalah&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEESiHIVAPuBIN48vH1xInBT1VOmbDEkRWQM dDSOAWC kp1X69gR 5J8962o4pq3PRFVMZ3H-z5oxU0eHarwRcMj2TgMiN3x6RmNHaru FTUco8fvDe2R1P4UnyjGRo2gpXAn1irDlcYBe&sig=AHIEtbQaM9uf2-TWt70cTPT9-16WVjb pL Q. Diunduh pada pukul: 10.05 WIB. Rabu, 20 Maret 2013).</p></div><div data-bbox=)

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Sri Devi Octaviani. (2009). "Analisis Komposisi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat". *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Republik Indonesia. *Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman*

Sri Mulyani Erlina. (2007).
*Metodologi Bisnis untuk Akuntansi dan
Manajemen*. Terbitan Pertama. Medan:
USU Press.

Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif*. Bandung:
Alfabeta. Cetakan keempat.

_____. (2007). *Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif*. Bandung:
Alfabeta. Cetakan pertama.

_____. (2008). *Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan R & D*.
Bandung: Alfabeta. Cetakan keempat.

Sulipan. (2007). *Penelitian Deskriptif
Analitis* (materi KTI On line). Jakarta:
Departemen Pendidikan Nasional
Direktorat Jendral Peningkatan Mutu
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.